

Prosedur Operasi Pengelolaan Aktivitas Regulatory and Project Liaison

Operating Procedure for Managing Regulatory and Project Liaison Activities

Pernyataan

Prosedur Operasi Pengelolaan Aktivitas Regulatory and Project Liaison ini disusun oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi serta standar yang relevan terkait perizinan proyek, pengadaan tanah dan penanganan/pengelolaan masalah sosial. Pedoman ini merupakan bukti dari komitmen PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk menjaga dan memastikan kelancaran serta kepatuhan proyek infrastruktur terhadap regulasi yang berlaku.

Statement

The Operating Procedure for Managing Regulatory and Project Liaison Activities is prepared by PT Perusahaan Gas Negara Tbk. in accordance with the company's business processes and referring to relevant regulations and standards related to project permits, land acquisition, and handling/management of social issues. This guideline is evidence of PT Perusahaan Gas Negara Tbk's commitment to maintain and ensure the smoothness as well as compliance of infrastructure projects with applicable regulations.

Pendahuluan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai "PGN", telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan proses bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Guna melaksanakan visi tersebut, PGN menyusun *Prosedur Operasi Pengelolaan Aktivitas Regulatory and Project Liaison*. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam rangka pemberian layanan oleh Divisi Regulatory and Project Liaison (RPL). Fungsi RPL mencakup tiga layanan utama yaitu mengurus legalitas proyek sesuai regulasi melalui sistem Online Single Submission (OSS), menyediakan lahan proyek melalui pembebasan atau sewa tanah, serta menangani dampak sosial.

Introduction

PT Perusahaan Gas Negara Tbk, hereinafter referred to as "PGN," has declared its commitment to realizing sustainable business processes that are responsible to the environment and society. To carry out this vision, PGN has prepared the *Operating Procedure for Managing Regulatory and Project Liaison Activities*. This document serves as a reference for the services provided by the Regulatory and Project Liaison (RPL) Division. The functions of RPL include three main services, namely managing project legality in accordance with regulations through the Online Single Submission (OSS), providing project land through land acquisition or leasing, and handling social impacts.

Definisi

- **BAST**
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Pemohon dan Divisi RPL
- **Pemohon**
Satuan kerja di lingkungan proyek
- **Sistem OSS (Online Single Submission)**
Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Definitions

- **BAST**
Minutes of Handover between the Applicant and the RPL Division
- **Applicant**
Working unit within the project
- **OSS System (Online Single Submission)**
Electronically Integrated Business Licensing System managed by the Ministry of Investment and Downstreaming/Investment Coordinating Board (BKPM).

Prosedur Pengurusan Perizinan Proyek

Tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengurusan perizinan proyek adalah sebagai berikut:

1. Pemohon menyampaikan Nota Dinas kepada RPL yang memuat deskripsi proyek dan peta tapak format SHP (*Shape File*).
2. RPL dapat mengundang Pemohon untuk diskusi dan finalisasi kebutuhan perizinan sesuai kelengkapan yang dipersyaratkan OSS.
3. RPL melaksanakan proses pengurusan izin dan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
4. Jika terjadi perubahan proyek, dilakukan pembahasan ulang bila diperlukan.
5. RPL menyampaikan progres pengurusan izin kepada Pemohon.
6. Setelah semua izin selesai, RPL dan Pemohon membuat BAST.

Project Licensing Procedure

The stages to be carried out in the project licensing process are as follows:

1. The Applicant submits an Official Memorandum to RPL containing the project description and site map in SHP (*Shape File*) format.
2. RPL may invite the Applicant for discussions and finalization of licensing requirements in accordance with OSS.
3. RPL carries out the licensing process and coordinates with the relevant work units.
4. If project changes occur, re-discussions are held if necessary.
5. RPL conveys the progress of the licensing process to the Applicant.
6. After all licenses are completed, RPL and the Applicant prepare the BAST.

Prosedur Pengadaan Tanah

Tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengadaan tanah adalah sebagai berikut:

1. Pemohon menyampaikan Nota Dinas kepada RPL berisi peta tapak format SHP dan pilihan prosedur pengadaan tanah (pembebasan atau sewa).
2. RPL dapat mengundang Pemohon untuk diskusi dan finalisasi kebutuhan serta tahapan pengadaan sesuai regulasi.
3. RPL melaksanakan proses pengadaan tanah dan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
4. RPL menyampaikan progres pengadaan tanah kepada Pemohon.
5. Setelah pengadaan tanah selesai, RPL dan Pemohon membuat BAST.

Land Acquisition Procedure

The stages to be carried out in the land acquisition process are as follows:

1. The Applicant submits an Official Memorandum to RPL containing the site map in SHP format and the chosen procedure of land acquisition (release or lease).
2. RPL may invite the Applicant for discussions and finalization of requirements and stages of acquisition in accordance with regulations.
3. RPL carries out the land acquisition process and coordinates with the relevant work units.
4. RPL conveys the progress of land acquisition to the Applicant.
5. After land acquisition is completed, RPL and the Applicant prepare the BAST.

Prosedur Penanganan/Pengelolaan Permasalahan Sosial

Tahapan yang harus dilakukan dalam proses penanganan dan pengelolaan masalah sosial adalah sebagai berikut:

1. Pemohon menyampaikan Nota Dinas kepada RPL berisi informasi jenis, lokasi, waktu, pihak terkait, dan dokumentasi masalah sosial.
2. RPL dapat mengundang Pemohon untuk klarifikasi dan finalisasi penanganan masalah sosial.
3. RPL melaksanakan proses penanganan dan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
4. RPL menyampaikan progres penanganan kepada Pemohon.

Procedure for Handling/Managing Social Issues

The stages to be carried out in the process of handling and managing social issues are as follows:

1. The Applicant submits an Official Memorandum to RPL containing information on the type, location, time, related parties, and documentation of the social issue.
2. RPL may invite the Applicant for clarification and finalization of social issue handling.
3. RPL carries out the handling process and coordinates with the relevant work units.
4. RPL conveys the progress of handling to the Applicant.

5. Setelah penanganan selesai, RPL dan Pemohon membuat BAST.

5. After handling is completed, RPL and the Applicant prepare the BAST.

Kesimpulan

Prosedur Operasi Pengelolaan Aktivitas Regulatory and Project Liaison yang disusun merupakan wujud komitmen PGN dalam memperkuat aspek tata kelola dan dampak sosial proyek. Melalui pengurusan perizinan berbasis OSS, pengadaan tanah yang sesuai regulasi, serta penanganan permasalahan sosial secara terstruktur, PGN memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur dijalankan secara legal, transparan, dan bertanggung jawab. Inisiatif ini mencerminkan komitmen PGN untuk membangun proyek yang tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga berkelanjutan dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Conclusion

The Operating Procedure for Managing Regulatory and Project Liaison Activities is a form of PGN's commitment to strengthening governance aspects and the social impact of projects. Through OSS-based licensing management, land acquisition in accordance with regulations, and structured handling of social issues, PGN ensures that every infrastructure project is carried out legally, transparently, and responsibly. This initiative reflects PGN's commitment to developing projects that are not only operationally efficient but also sustainable and positively contributing to society and the environment.

Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan pedoman ini antara lain:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

References

References used in the preparation of this guideline include:

1. Law Number 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law
2. Government Regulation Number 5 of 2021 on the Implementation of Risk-Based Business Licensing
3. Government Regulation Number 16 of 2021 on Building Approval (PBG) and Certificate of Worthiness of Function (SLF)
4. Government Regulation Number 19 of 2021 on the Implementation of Land Acquisition for Public
5. Government Regulation Number 21 of 2021 on Spatial Planning Implementation - KKPR (Conformity of Spatial Utilization Activities)
6. Government Regulation Number 22 of

- Penataan Ruang - KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Pertek Andalalin
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Sewa Barang Milik Negara (BMN)
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)
 12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Persetujuan Layak Operasi (PLO)
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Bidang Laut
 14. Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL/UKL-UPL/SPPL
 15. Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertek Emisi
 16. Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertek Air Limbah
 17. Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertek dan Sertifikat Layak Operasional (SLO)
 18. Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertek Limbah B3
 19. Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan
 20. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan
 - 2021 on Environmental Protection and
 7. Government Regulation Number 23 of 2021 on Forestry
 8. Minister of Finance Regulation Number 125/PMK.01/2008 on Public Appraisal Service Office (KJPP)
 9. Minister of Transportation Regulation Number PM 75 of 2015 on Andalalin Technical Recommendation (Pertek Andalalin)
 10. Minister of Finance Regulation Number 57 of 2016 on Leasing of State-Owned Goods (BMN)
 11. Minister of Transportation Regulation Number PM 20 of 2017 on Special Terminals and TUKS (Terminals for Own Interests)
 12. Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 18 of 2018 on Operating Worthiness Approval (PLO)
 13. Minister of Transportation Regulation Number 89 of 2018 on Norms, Standards, Procedures, and Criteria for Electronically Integrated Business Licensing in the Marine Sector
 14. Minister of Environment and Forestry Regulation Number 4 of 2021 on the List of Businesses/Activities Requiring AMDAL/UKL-UPL/SPPL
 15. Minister of Environment and Forestry Regulation Number 5 of 2021 on Emission Technical Recommendations (Pertek Emission)
 16. Minister of Environment and Forestry Regulation Number 5 of 2021 on Wastewater Technical Recommendations (Pertek Wastewater)
 17. Minister of Environment and Forestry Regulation Number 5 of 2021 on Technical Recommendations and Certificate of Operating Worthiness (SLO)
 18. Minister of Environment and Forestry

- Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pemegang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non-Kehutanan (PKKNK)
21. Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
 22. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
 23. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang Laut
 25. SK Menteri LHK No. SK.5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021 tentang Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
 26. Peraturan Kepala BPS Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
 27. Keputusan Direksi PGN No. 055100.ND/OT/PDO/2022 tentang Pedoman Proses Bisnis
 28. Keputusan Direksi PGN No. 003900.K/OT.00/PDO/2022 tentang Bilahan Struktur Organisasi Dasar Subholding Gas
 29. Keputusan Direksi PGN No. 006500.K/OT.00.00/INT/2022 tentang Tata Kerja Direktorat Infrastruktur dan Teknologi
 30. Keputusan Direksi PGN No. 004100.K/OT.00/HCGS/2023 tentang Struktur Organisasi beserta PRL dan Formasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
 31. Pedoman Pengelolaan Dokumen Acuan Kerja PGN No. Regulation Number 6 of 2021 on Hazardous Waste (B3 Waste) Technical Recommendations
 19. Minister of Environment and Forestry Regulation Number 7 of 2021 on Forestry Planning
 20. Minister of Environment and Forestry Regulation Number 8 of 2021 on Forest Management and Preparation of Forest Management Plans as well as Forest Utilization in Protected and Production Forests, Holders of Timber Utilization Approval for Non-Forestry Activities (PKKNK)
 21. Minister of Environment and Forestry Regulation Number 9 of 2021 on Social Forestry Management
 22. Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation Number 13 of 2021 on Implementation of KKPR and Synchronization of Spatial Utilization Programs
 23. Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation Number 15 of 2021 on Coordination of Spatial Planning Implementation
 24. Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 28 of 2021 on Marine Spatial Planning
 25. Decree of the Minister of Environment and Forestry No. SK.5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021 on Indicative Map of New Permit Moratorium
 26. Head of Statistics Indonesia (BPS) Regulation Number 19 of 2017 on Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI)
 27. PGN Board of Directors Decree No. 055100.ND/OT/PDO/2022 on Business Process Guideline
 28. PGN Board of Directors Decree No. 003900.K/OT.00/PDO/2022 on

P-001/32.06/2023 tanggal 3 Agustus
2023

Basic Organizational Structure of Gas
Subholding

29. PGN Board of Directors Decree No. 006500.K/OT.00.00/INT/2022 on Work Procedures of the Directorate of Infrastructure and Technology
30. PGN Board of Directors Decree No. 004100.K/OT.00/HCGS/2023 on Organizational Structure along with PRL and Formation of PT Perusahaan Gas Negara Tbk
31. PGN Work Reference Document Management Guideline No. P-001/32.06/2023 dated August 3, 2023